



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 523);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.603.198.969.453,92
b. Belanja	Rp. 1.599.512.950.453,92
Surplus/(Defisit)	Rp. 3.686.019.000,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 14.963.981.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 18.650.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. (3.686.019.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 28 Desember 2016
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 98

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.603.198.969.453,92
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.730.142.814,60
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.136.174.375,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.829.331.282,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.462.598.312,60
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.302.038.845,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.120.665.666.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.259.662.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	784.744.357.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	271.661.647.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	243.803.160.639,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.109.760.800,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.121.950.839,32
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	162.571.449.000,00
2	BELANJA	1.599.512.950.453,92
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	855.896.501.663,43
2.1.1	Belanja Pegawai	622.024.575.940,24
2.1.2	Belanja Bunga	3.500.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.740.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.396.550.565,70
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.235.375.157,49
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	743.616.448.790,49
2.2.1	Belanja Pegawai	39.833.112.993,69
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.520.176.414,34
2.2.3	Belanja Modal	347.263.159.382,46
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.686.019.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.963.981.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14.663.981.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.650.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.650.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.686.019.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
Gerung, 28 Desember 2016 BUPATI LOMBOK BARAT H. FAUZAN KHALID		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.603.198.969.453,92	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.730.142.814,60	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.136.174.375,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	42.339.315.200,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	7.500.000.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	22.933.765.200,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	6.336.000.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	2.475.000.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	62.700.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.000.000.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	500.000.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	332.200.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	1.199.650.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	19.010.222.182,00	
4.1.1.02.01	Restoran	18.132.150.621,38	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	878.071.560,62	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	8.155.224.000,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	5.176.224.000,00	
4.1.1.03.06	Diskotik	370.541.600,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.03.07	Karaoke	1.362.614.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	71.258.000,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	405.000.000,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	712.580.000,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	57.006.400,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	497.200.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	482.309.300,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	14.890.700,00	Perda No.2 Thn 2011 Ttg Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	17.875.574.375,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	17.875.574.375,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.1.07	Pajak Parkir	271.263.382,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	271.263.382,00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	2.153.155.236,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2.153.155.236,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.135.420.000,00	
4.1.1.11.01	Pajak Minerba	1.135.420.000,00	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.932.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.932.000.000,00	
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.766.800.000,00	
4.1.1.13.01	BPHTB	10.766.800.000,00	Perda No.1 Th 2011 Ttg BPHTB
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.829.331.282,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.654.772.330,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.068.122.500,00	Perda No.3 Th 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.600.000.000,00	Perda No.3 Th 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	211.324.400,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.417.790.000,00	Perda No.3 Th 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	357.535.430,00	Perda No.3 Th 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.644.968.802,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.880.725.549,80	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	856.302.702,20	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	73.000.400,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	85.921.000,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	107.800.000,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	92.400.000,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	78.431.650,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	470.387.500,00	Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.529.590.150,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.015.200.000,00	Perda No.10 Thn.2011 Ttg Ret.Perij.Tertentu
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	Perda No.8 Tahun 2015 ttg Retribusi Izin tmpt Penj
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.000.000.000,00	Perda No.10 Thn.2011 Ttg Ret.Perij.Tertentu
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	39.750.150,00	Perda No.10 Thn.2011 Ttg Ret.Perij.Tertentu
4.1.2.03.06	Retribusi IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)	600.000.000,00	Perda No.4 Tahun 2014 Ttg Retribusi IMTA
4.1.2.03.16	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.674.640.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.462.598.312,60	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.462.598.312,60	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5.276.538.494,20	
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju	1.000.000.000,00	
4.1.3.01.03	Bank Perkreditan Rakyat (BPR-LKP)	1.597.679.529,00	
4.1.3.01.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan (PT. Bank NTB)	7.500.000.000,00	
4.1.3.01.07	BPR Layar Berkembang	83.317.252,00	
4.1.3.01.08	PT. Jamkrida NTB Bersaing	5.063.037,40	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.302.038.845,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	431.394.600,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	6.347.666,60	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	35.546.933,40	
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	389.500.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.057.292.603,11	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	8.057.292.603,11	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	630.000.000,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	630.000.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	80.134.151.641,89	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	80.134.151.641,89	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	49.200.000,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	49.200.000,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.120.665.666.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.259.662.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	29.645.485.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.748.993.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.1.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 WP orang pribadi dalam Negeri Pasal 21	9.850.937.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.1.01.04	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.045.555.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34.614.177.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	18.091.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	33.102.962.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.493.124.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.2	Dana Alokasi Umum	784.744.357.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	784.744.357.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	784.744.357.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	271.661.647.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	271.661.647.000,00	
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	13.550.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	16.886.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	8.285.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan	5.990.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.05	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	2.319.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan	2.330.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.16	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.364.400.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.17	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	123.932.138.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.18	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	2.157.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.19	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.547.104.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.21	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.458.168.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.22	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1.755.014.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.23	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	817.800.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.24	DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	5.287.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.25	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	440.264.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.26	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.462.759.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.27	DAK Penugasan Bidang Air MInum	5.617.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.28	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.358.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.29	DAK Penugasan Bidang Jalan (Prioritas Daerah)	49.025.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.30	DAK Penugasan Bidang Pasar	2.891.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.2.3.01.31	DAK Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	9.189.000.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	243.803.160.639,32	
4.3.1	Pendapatan Hibah	18.109.760.800,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.109.760.800,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.109.760.800,00	PHD No.PHD-112/PK/2012
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.121.950.839,32	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	63.121.950.839,32	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.218.190.980,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.368.949.796,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.074.269.223,32	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	15.151.400,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20.445.389.440,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	162.571.449.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	162.571.449.000,00	
4.3.4.01.06	Alokasi Dana Desa	108.749.278.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
4.3.4.01.07	Dana Insentif Daerah (DID)	53.822.171.000,00	Situs Resmi DJPK Kemenkeu RI
5	BELANJA	1.599.512.950.453,92	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	855.896.501.663,43	
5.1.1	Belanja Pegawai	622.024.575.940,24	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	432.252.008.362,06	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	319.454.379.154,50	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	33.465.413.565,49	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.613.945.950,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.279.390.240,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.229.084.400,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	22.054.326.079,60	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	382.080.954,87	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.978.096,60	
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	11.855.312.721,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	93.229.500,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	29.094.975,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	65.315.250,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	38.991.225,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.510.775,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	31.835.475,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	6.240.000.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	15.000.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	182.602.352.000,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	54.101.326.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	31.824.000,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.939.800.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	2.157.000.000,00	
5.1.1.02.07	Tunjangan Profesi Guru/ Sertifikasi Guru	124.372.402.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.045.500.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.685.500.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.386.655.139,08	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.386.655.139,08	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	738.060.439,10	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	738.060.439,10	
5.1.2	Belanja Bunga	3.500.000.000,00	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	3.500.000.000,00	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.500.000.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	18.740.000.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	17.300.000.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada KPUD	4.500.000.000,00	
5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada POLRI	300.000.000,00	
5.1.4.05.03	Hibah Kepada LPTQ	1.750.000.000,00	
5.1.4.05.05	Hibah Kepada PHDI	50.000.000,00	
5.1.4.05.09	Hibah Kepada PMI	100.000.000,00	
5.1.4.05.10	Hibah Kepada Pramuka	300.000.000,00	
5.1.4.05.15	Hibah Kepada Bazda	500.000.000,00	
5.1.4.05.18	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	150.000.000,00	
5.1.4.05.22	Hibah kepada TNI	500.000.000,00	
5.1.4.05.23	Hibah Kepada Forum Wartawan Lobar	50.000.000,00	
5.1.4.05.30	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	150.000.000,00	
5.1.4.05.32	Hibah Kepada FKSP	270.000.000,00	
5.1.4.05.34	Hibah Kepada Dewan Pendidikan	50.000.000,00	
5.1.4.05.35	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Yayasan/Ponpes	4.040.000.000,00	
5.1.4.05.38	Hibah Kepada PAUD	4.160.000.000,00	
5.1.4.05.39	Hibah Kepada KAHMI	50.000.000,00	
5.1.4.05.40	Hibah Kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	50.000.000,00	
5.1.4.05.41	Hibah Kepada NU Lobar	125.000.000,00	
5.1.4.05.42	Hibah Kepada PP Muhammadiyah Lobar	25.000.000,00	
5.1.4.05.44	Hibah Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)	25.000.000,00	
5.1.4.05.45	Hibah Kepada LKKS	25.000.000,00	
5.1.4.05.46	Hibah Kepada PPNI	30.000.000,00	
5.1.4.05.47	Hibah Kepada Ikatan Apoteker Indonesia	50.000.000,00	
5.1.4.05.48	Hibah Kepada HIMPAUDI	50.000.000,00	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	715.000.000,00	
5.1.4.06.04	Hibah Kepada KORPRI	50.000.000,00	
5.1.4.06.05	Hibah Kepada PGRI	40.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4.06.08	Hibah Kepada Institusi Multi Pihak	500.000.000,00	
5.1.4.06.11	Hibah Kepada FKUB	25.000.000,00	
5.1.4.06.16	Hibah Kepada LB2M (Lembaga Bina Mitra Mandiri)	100.000.000,00	
5.1.4.07	Belanja Hibah Kepada Organisasi Olahraga	725.000.000,00	
5.1.4.07.01	KONI	725.000.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000.000,00	
5.1.5.01.29	Belanja Bantuan Bea Siswa Pendidikan Gratis	2.000.000.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.396.550.565,70	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.396.550.565,70	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.396.550.565,70	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.235.375.157,49	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	194.459.679.900,00	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	194.459.679.900,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	775.695.257,49	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	775.695.257,49	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	743.616.448.790,49	
5.2.1	Belanja Pegawai	39.833.112.993,69	
5.2.1.01	Honorarium PNS	25.596.762.700,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.809.304.700,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)	322.445.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang	191.563.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilai	200.375.000,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Penulisan Naskah	73.075.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.319.910.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.250.310.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia	69.075.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Tim Penilai	525.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.03	Uang Lembur	2.806.230.498,30	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.806.230.498,30	
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	8.110.209.795,39	
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD	8.110.209.795,39	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.520.176.414,34	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.191.569.419,65	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.120.688.521,65	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	100.160.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	343.582.500,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	217.132.600,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	735.384.850,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	78.487.850,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	117.600.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll	1.439.331.085,00	
5.2.2.01.10	Belanja Film dan Cuci Cetak	273.090.200,00	
5.2.2.01.11	Belanja Soft Ware	120.000.000,00	
5.2.2.01.12	Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul	1.384.981.813,00	
5.2.2.01.13	Belanja Hadiah	233.250.000,00	
5.2.2.01.15	Belanja Alat-alat Olahraga	13.500.000,00	
5.2.2.01.16	Belanja Seprei/Sarung/Taplak Meja/Selimut/Pakaian Bayi	14.380.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.806.549.576,35	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	716.402.900,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	159.746.125,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	130.200.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.341.352.551,35	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	797.960.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Sembako/Pakan Ikan/Pakan Ternak	732.500.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kontrasepsi	589.415.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Pameran	64.098.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Praktek/Lomba	773.344.000,00	
5.2.2.02.10	Belanja Pupuk Organik/Anorganik	171.295.000,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan dan Peralatan Tata Rias Salon	28.800.000,00	
5.2.2.02.27	Belanja Bahan-bahan Plastik	8.120.000,00	
5.2.2.02.30	Belanja Cendramata **)	246.745.000,00	
5.2.2.02.31	Belanja Bahan dan Peralatan Pertanian dan Perikanan	46.571.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.669.788.392,07	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	864.280.400,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	781.821.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.334.719.131,07	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.193.802.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.493.036.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	61.614.800,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi/ Pengujian	809.510.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	16.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Periklanan/Promosi/Publikasi	3.041.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Jasa Pembuatan Plank	57.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa tenaga non pegawai	22.385.760.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa kebersihan	274.460.025,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Medis	1.973.609.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kalibrasi/Tera Ulang	82.040.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	5.793.786.036,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Komputer	6.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	1.500.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.507.095.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.507.095.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.689.944.667,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.456.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.421.608.892,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.074.024.075,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	27.925.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	641.586.700,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pengecatan	68.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.439.274.277,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.594.950.450,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.428.259.727,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	416.064.100,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.004.065.650,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.584.020.650,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	417.045.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.048.150.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.048.150.000,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	51.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Sewa Alat dan Mesin	51.750.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.873.035.380,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	306.982.500,00	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	61.500.000,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	15.500.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	570.376.250,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/TradisionalPeralatan Kesenian	452.308.600,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	158.000.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Tanaman Hias	144.500.000,00	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Peralatan Panggung	112.518.030,00	
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Alat-alat Praktek/Peraga	41.350.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.411.806.300,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	756.840.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.802.050.500,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.492.915.800,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	360.000.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	492.696.750,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	50.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	106.250.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	50.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	131.896.750,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	139.550.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Atribut Pakaian Dinas	15.000.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	411.996.450,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	375.596.450,00	
5.2.2.13.02	Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut	36.400.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	694.167.500,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	55.650.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	146.240.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	437.777.500,00	
5.2.2.14.14	Belanja Pakaian Toga	54.500.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.362.301.275,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.965.373.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.396.928.275,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	5.000.000,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	5.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.988.642.700,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.308.603.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	125.350.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	727.000.000,00	
5.2.2.17.04	Uang Saku	4.763.625.000,00	
5.2.2.17.05	Uang Transport	11.064.064.700,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.249.681.049,53	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.758.221.873,53	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.015.103.909,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	626.914.577,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Komputer	609.000.000,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman	444.931.390,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan	9.960.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	52.200.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	25.000.000,00	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kantor	105.000.000,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor	107.125.000,00	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	35.375.000,00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	79.100.000,00	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Tanaman	190.373.500,00	
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian/Perikanan	7.600.000,00	
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	283.225.000,00	
5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat Kominikasi	18.054.000,00	
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	13.000.000,00	
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Alat Perbengkelan	10.650.000,00	
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	78.500.000,00	
5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	113.560.000,00	
5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian/Drum Band	7.000.000,00	
5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Publikasi	114.595.000,00	
5.2.2.20.28	Belanja Pemeliharaan Tugu/Monumen/Pintu Gerbang	79.907.000,00	
5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	38.050.000,00	
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)	417.234.800,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultan	9.218.301.496,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultan Penelitian	911.970.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	4.755.766.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan	707.525.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Umum	2.843.040.496,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.992.962.741,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.928.752.741,00	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	64.210.000,00	
5.2.2.24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.403.382.790,74	
5.2.2.24.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.403.382.790,74	
5.2.2.25	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.008.015.000,00	
5.2.2.25.01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.008.015.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	347.263.159.382,46	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	43.386.000.000,00	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.820.000.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.870.000.000,00	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	37.696.000.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	470.000.000,00	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	470.000.000,00	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	0,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	480.090.000,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	244.280.000,00	
5.2.3.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	31.970.000,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	203.840.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.195.738.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.195.738.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.424.049.100,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.355.763.100,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.850.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	379.500.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	642.691.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.245.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.820.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.820.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.030.000,00	
5.2.3.22.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	16.030.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	3.000.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	428.114.000,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	153.679.000,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	19.400.000,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	157.535.000,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	97.500.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	4.500.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.500.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	465.535.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	15.860.000,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	77.825.000,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	371.850.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.212.538.700,00	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	20.000.000,00	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	14.000.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	181.980.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	996.558.700,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.815.963.532,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.023.501.206,00	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.000.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	80.574.586,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	716.144.500,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	126.460.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	823.630.040,00	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	44.653.200,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.720.119.997,30	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	281.960.100,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.751.278.297,30	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	316.175.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	783.546.600,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	587.160.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	724.689.500,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	269.252.000,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	59.200.000,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	141.777.500,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,00	
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	17.950.000,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya	59.900.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	170.610.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	688.885.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	453.165.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	235.720.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	355.780.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	143.530.000,00	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.000.000,00	
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	9.310.000,00	
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	20.940.000,00	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	173.000.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	4.447.674.740,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.608.913.166,00	
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	50.000.000,00	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	701.680.000,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	812.265.000,00	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.274.816.574,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	6.706.430.405,00	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	6.706.430.405,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.024.661.447,76	
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	115.345.947,76	
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	146.415.000,00	
5.2.3.36.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	64.470.000,00	
5.2.3.36.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	20.750.000,00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	11.420.000,00	
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	13.800.000,00	
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	4.500.000,00	
5.2.3.36.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	82.770.000,00	
5.2.3.36.49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	198.650.000,00	
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	1.366.540.500,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.468.574.800,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	7.468.574.800,00	
5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	47.488.843,00	
5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	47.488.843,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	120.115.000,00	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	120.115.000,00	
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	35.490.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.43.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	35.490.000,00	
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	6.925.000,00	
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	6.925.000,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	46.550.000,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	46.550.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.353.274.617,40	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	32.167.732.270,00	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	371.373.600,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	12.962.352.947,00	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.360.978.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.962.123.554,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.147.320.000,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.436.461.252,68	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	130.640.000,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.357.655.190,00	
5.2.3.49.17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	53.690.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.402.947.803,72	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	965.175.000,00	
5.2.3.52.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	965.175.000,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	500.137.500,00	
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	70.577.500,00	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	429.560.000,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	101.966.000,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	101.966.000,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.521.725.000,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	122.087.985.000,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.433.740.000,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	23.817.390.000,00	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	23.604.090.000,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	213.300.000,00	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.284.230.000,00	
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.924.000.000,00	
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.360.230.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.600.000,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.600.000,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.594.412.400,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.594.412.400,00	
5.2.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	201.430.000,00	
5.2.3.76.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	201.430.000,00	
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	15.700.000,00	
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	15.700.000,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	22.100.000,00	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	22.100.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.476.226.700,00	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	2.473.226.700,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	3.000.000,00	
5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	175.800.000,00	
5.2.3.81.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	175.800.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.226.659.100,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.226.659.100,00	
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	51.150.000,00	
5.2.3.84.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	51.150.000,00	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	72.320.000,00	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	72.320.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	319.300.000,00	
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	35.000.000,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	284.300.000,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	259.800.000,00	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	259.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.686.019.000,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.963.981.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14.663.981.000,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	14.663.981.000,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	810.000.000,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	1.103.981.000,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.750.000.000,00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Badan Usaha Milik Daerah)	300.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.650.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.650.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.650.000.000,00	
6.2.2.02.01	Badan Usaha Milik Daerah (PT. Bank NTB)	2.500.000.000,00	
6.2.2.02.02	BPR-LKP	750.000.000,00	
6.2.2.02.03	PDAM	0,00	
6.2.2.02.08	BPR-Layar Berkembang	400.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15.000.000.000,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	15.000.000.000,00	
6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Hutang Kepada PT. Bank NTB	15.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.686.019.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Gerung, 28 Desember 2016
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID